



► ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Tingkatkan Pelayanan, Disdukcapil Jaring Aspirasi Publik

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja menggalang masukan dan menyerap aspirasi dari stakeholder mereka untuk meningkatkan pelayanan dengan menggelar acara forum konsultasi publik di Hotel Abadi Malioboro, Selasa (9/8).

Forum Konsultasi Publik ini mengambil tema *Standar Pelayanan Publik dari Kebijakan Administrasi Kependudukan di Era Digitalisasi*. Kepala Disdukcapil Kota Jogja, Septi Sri Rejeki, menjelaskan saat ini pelayanan Disdukcapil dilakukan secara digital maupun manual.

"Pelayanan *online* lewat JSS [*Jogja Smart Service*]. Ketika di JSS belum ada, kami melakukan layanan lewat *Whatsapp*. Di satu sisi kondisi masyarakat Jogja sangat majemuk, sehingga kalau

100 persen digitalisasi, kasihan warga yang tidak bisa mengakses permohonan layanan secara digital, sehingga kami harus bisa melayani dari sisi apapun. Kami tetap membuka layanan *face to face*," ujarnya, Selasa.

Pada layanan *face to face* atau datang langsung di Kantor Disdukcapil Kota Jogja, pelayanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan prima. Ia mencontohkan untuk kelompok difabel pelayanan dikhususkan pada loket 8.

"Loket ini khusus untuk difabel, ibu menyusui, ibu hamil dan warga lansia. Loket dilengkapi *guiding block* yang merupakan salah satu ciri layanan prima," katanya.

Tahun ini, Disdukcapil Kota Jogja menargetkan tertib kepemilikan dokumen administrasi kependudukan masyarakat mencapai 93,05%. Sampai

Juli 2024, sudah mencapai 95,85%. "Jadi capaian kami sudah di atas target 2024, padahal baru di pertengahan tahun," ungkapnya.

Disdukcapil Kota Jogja juga telah melampaui target dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran di 2024. Untuk KIA, targetnya 70% dan sudah terealisasi 95,54%. Kemudian untuk Akta Kelahiran dari target 99% sudah terealisasi 99,54%.

Meski demikian, masih ada dua poin yang belum mencapai target, yakni aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan KTP-el.

Ia mengingatkan masyarakat jika *output* pelayanan Disdukcapil merupakan dasar bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan lainnya. "Seseorang tidak dapat memperoleh bantuan sosial [*bansos*] tanpa nomor

induk kependudukan [NIK] dan kartu keluarga [KK]. Anak tidak bisa masuk sekolah tanpa NIK. Menjadi pemilih dalam pemilu tanpa NIK juga tidak bisa," katanya.

Melalui forum ini diharapkan berbagai *stakeholder* termasuk pemangku kepentingan di wilayah dapat memberi masukan yang berguna untuk peningkatan kualitas pelayanan Disdukcapil Kota Jogja.

"Melalui forum ini diharapkan dapat menghiimpun aspirasi pemangku kepentingan terhadap kualitas pelayanan Disdukcapil Kota Jogja. Masukan dan saran sudah kami tindaklanjuti semua sehingga Disdukcapil Kota Jogja meraih berbagai penghargaan dan apresiasi dari Pemerintah Pusat, Pemda DIY dan Pemkot Joga," katanya. (Lugas Subarkah/*)



Harian Jogja-Lugas Subarkah

Kepala Disdukcapil Kota Jogja, Septi Sri Rejeki, saat menyampaikan paparan dalam *Forum Konsultasi Publik* di Hotel Abadi Malioboro, Selasa (6/8).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005